

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam.....	19
B. Politik Hukum	24
C. Keadilan Lingkungan	30
1. Munculnya gerakan keadilan lingkungan.....	30
2. Pengertian keadilan lingkungan	32
3. Klasifikasi keadilan lingkungan	36
D. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan	41
1. Pengertian ormas keagamaan	41
2. Ormas keagamaan di Indonesia.....	42
E. Izin Usaha Pertambangan Khusus	49
1. Pengertian izin usaha pertambangan.....	49

2. Izin usaha pertambangan khusus.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis dan Sifat Penelitian	55
B. Bahan Penelitian	56
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	58
D. Analisis Hasil	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Politik Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Ormas Keagamaan.....	60
1. Analisis politik Hukum Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Kepada Ormas Keagamaan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	60
2. Menelusuri kata prioritas dalam pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan.....	95
B. Potensi Dampak Pemberian Konsesi Pertambangan bagi Ormas Keagamaan Perspektif Keadilan Lingkungan.....	109
BAB V PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan perbedaan dasar menimbang dalam UU 4/2009, UU 3/2020, dan UU 2/2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	85
Tabel 2. Daftar Inventaris Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2019	97
Tabel 3. Analisis positif-negatif kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada ormas keagamaan dalam perspektif keadilan distributif.....	128
Tabel 4. Analisis positif-negatif kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada ormas keagamaan dalam perspektif keadilan prosedural	139
Tabel 5. Analisis positif-negatif kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada ormas keagamaan dalam perspektif keadilan korektif.....	149
Tabel 6. Analisis positif-negatif kebijakan pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus kepada ormas keagamaan dalam perspektif keadilan sosial	155